BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap tindakan dan perbuatan hukum masyarakat diatur dalam undang-undang yang memiliki bidang dan peran masing-masing untuk membuat masyarakat menaati aturan yang berlaku. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana serta akibat yang diterima dari perbuatan pidana atau yang disebut dengan sanksi pidana. Salah satu tindakan pidana yang ada di Indonesia adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian suatu negara dapat dilakukan demi kepentingan diri sendiri dengan cara penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Korupsi dapat dilakukan dengan sendiri maupun secara berkelompok. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra-ordinary crime*. Korupsi juga merupakan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara hingga pejabat pada lapisan bawah di negara ini.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status sosial. Secara umum kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara sepenuhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam ataupun orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak serta ada dorongan dari diri sendiri maupun orang lain sering kali menimbulkan pemikiran untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa berpikir dengan logis. Hal seperti itu dapat mendorong manusia untuk melakukan praktek korupsi.

Meningkatnya praktek korupsi mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan juga merusak kehidupan bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat maka tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa. Upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin hari semakin mengalami kemajuan mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan melindungi hak ekonomi dan hak sosial masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**”

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ?
- c. Bagaimanakah penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi
- c. Penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi semua kalangan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan juga untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum tertinggi di Indonesia untuk meningkatkan keadilan dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan kasus korupsi.

5. Kerangka Teori Dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, yang berarti adanya peraturan yang bersifat umum untuk membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan apa saja peraturan yang berlaku di negara serta apa saja yang dapat dilakukan negara terhadap masyarakat.

b. Teori Konsepsi

1. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²

2. Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

¹ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

3. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴

4. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dalam suatu negara.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

⁴ Pasal 1 Undang-Undang no 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman